

Permasalahan kasus kemiskinan di Kota Malang

Muhammad Shobih*Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**E-mail: 230301110066@student.uin-malang.ac.id***Kata Kunci:**

permasalahan, kemiskinan, faktor-faktor, solusi komprehensif, Kota Malang

Keywords:

problems, poverty, factors, comprehensive solutions, Malang City

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang permasalahan kasus Kemiskinan di Kota Malang yang merupakan permasalahan kompleks yang dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Artikel ini juga mengidentifikasi tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap kemiskinan di Kota Malang. Faktor Pertama di sebabkan Pertumbuhan penduduk yang pesat tanpa diimbangi dengan lapangan pekerjaan dan infrastruktur yang memadai dapat memperparah kemiskinan, kedua di sebabkan oleh Rendahnya tingkat pendidikan yang dapat membatasi kemampuan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi, dan faktor yang ketiga di sebabkan ada nya pembangunan ekonomi yang tidak merata dan kurangnya lapangan kerja berkualitas yang dapat memperparah kemiskinan. Artikel ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut saling terkait dan solusi untuk mengatasinya harus komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak.

ABSTRACT

This article discusses the problem of poverty in Malang City, which is a complex problem triggered by various interrelated factors. This article also identifies three main factors that contribute to poverty in Malang City. The first factor is the rapid population growth without adequate jobs and infrastructure that can exacerbate poverty, the second is the low level of education that can limit a person's ability to get a decent job and earn a high income, and the third factor is the uneven economic development and lack of quality jobs that can exacerbate poverty. This article shows that the three factors are interrelated and the solution to overcome them must be comprehensive and sustainable, involving various parties.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah klasik yang sulit diselesaikan di mana pun di negara mana pun. Kemiskinan masih belum diselesaikan, baik di negara berkembang maupun negara maju. Tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Indonesia tidak pernah menjadi negara maju karena perbedaan yang jelas antara orang kaya dan miskin. Menurut Badan Pusat Statistik, ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup didefinisikan sebagai kemiskinan. Untuk definisi lebih lanjut, kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan di mana nilai standar kebutuhan minimal berada di bawah garis, yang mencakup kebutuhan pangan dan nonpangan. Ini juga disebut sebagai garis kemiskinan atau ambang kemiskinan (Ferezegia, 2018). Keadaan ketidakmampuan yang membuat orang rentan terhadap munculnya masalah sosial

*This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.**Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.*

tambahan yang memengaruhi individu, keluarga, dan kelompok. Seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, dikatakan masuk dalam kemiskinan ketika hak-hak dasar mereka untuk hidup dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat tidak ditegakkan dengan tepat (Nasution & Tambunan, 2022). Namun, Pembukaan UU Dasar 1945 menyatakan bahwa memajukan kesejahteraan umum adalah langkah pertama dalam mencapai masyarakat yang sejahtera. Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945, peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan diperlukan untuk mengatur masalah pengentasan kemiskinan. Jika pemerintah tidak segera mengatasi bahaya kemiskinan, hal itu akan berdampak nyata pada kehidupan masyarakat (Larasati, 2013).

Salah satu kota di Indonesia yang menghadapi tantangan kemiskinan adalah Malang. Kota ini terletak di Provinsi Jawa Timur, dengan koordinat sekitar 7.9666° Lintang Selatan dan 112.6326° Bujur Timur. Malang berada di bagian tengah provinsi dan dikelilingi oleh Kabupaten Malang dari semua sisi. Dengan ketinggian sekitar 440-667 meter di atas permukaan laut, kota ini termasuk dalam dataran tinggi, memiliki luas $145,28 \text{ km}^2$ (atau 56,09 mil²), dan dihuni oleh sekitar 857.891 orang. Kota ini berbatasan dengan beberapa kecamatan: Singosari dan Karangploso di utara; Pakis dan Tumpang di timur; Tajinan dan Pakisaji di selatan; serta Wagir dan Dau di barat (Larasati, 2013). Kemiskinan menjadi fokus utama perhatian pemerintah Kota Malang saat ini. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat menjadi 28,55 juta orang sepanjang tahun 2013, dengan Pulau Jawa mencatat jumlah terbanyak, yaitu 15,55 juta orang. Lokasi strategis Malang menjadikannya kota terbesar kedua di Jawa Timur, yang mengalami pertumbuhan populasi pesat akibat urbanisasi yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk di Malang juga dipicu oleh banyaknya imigran yang datang. Sebagai hasilnya, jumlah penduduk miskin di Kota Malang pun meningkat. Sebuah survei dari Dinas Sosial dan Catatan Kependudukan Pemerintah Kota Malang menunjukkan bahwa dari total 840.803 penduduk pada tahun 2013, sebanyak 43.400 orang masih terdaftar sebagai warga miskin (Setyoharini, 2022).

Kota Malang sebagai kota metropolitan kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, diharapkan dapat menjadi model bagi kota-kota lain dalam upaya penanganan kemiskinan yang terbaik di provinsi Jawa Timur. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Malang perlu diimplementasikan melalui berbagai perencanaan, kebijakan, dan program pembangunan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan rumit. Penanganan semua aspek kehidupan dan integrasinya secara holistik diperlukan untuk proses pengurangan dan penanggulangan kemiskinan. Kesenjangan pendapatan di masyarakat menyebabkan kemiskinan, karena hal tersebut menghalangi sebagian individu untuk memanfaatkan manfaat pembangunan atau untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Oleh karena itu, tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai permasalahan kemiskinan, faktor-faktor kasus kemiskinan di Kota Malang dan berkontribusi terhadap pandangan generasi muda terhadap kemiskinan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia tak hanya Kota Malang, serta upaya pemerintah untuk menanggulanginya, mengingat masalah kemiskinan yang terus ada di negara ini. Peneliti menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) bersama dengan metode penelitian kualitatif. Zed mendefinisikan bahwa studi pustaka (*library research*) sebagai

pendekatan pengumpulan data yang melibatkan pemahaman dan pemeriksaan teori dari berbagai literatur yang relevan. Mempersiapkan perangkat yang diperlukan, membuat bibliografi yang berfungsi, menjadwalkan waktu, dan membaca atau mencatat materi penelitian adalah empat langkah penelitian kepustakaan. Proses pengumpulan data melibatkan pencarian sumber dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk website, artikel, buku, dan jurnal penelitian sebelumnya. Gagasan dan proposisi penelitian kemudian didukung oleh analisis menyeluruh dan kritis terhadap materi pustaka yang diambil dari referensi ini (Nurainun dkk, 2023).

PEMBAHASAN

Faktor Jumlah Penduduk di Kota Malang

Pertumbuhan penduduk Kota Malang terus meningkat setiap tahun, didorong oleh urbanisasi, migrasi internal, dan pertumbuhan alami. Peningkatan jumlah penduduk ini berdampak pada tingkat kemiskinan di kota tersebut. Salah satu dampak utamanya adalah persaingan yang semakin ketat untuk mendapatkan pekerjaan. Jika penciptaan lapangan kerja tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran dan kemiskinan akan meningkat. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang cepat menambah beban pada infrastruktur dan layanan publik seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan infrastruktur yang memadai dapat menurunkan kualitas hidup dan memperburuk kemiskinan. Kebutuhan akan perumahan yang meningkat juga dapat menyebabkan banyak penduduk tidak mampu memiliki atau menyewa tempat tinggal yang layak, yang berkontribusi pada munculnya permukiman kumuh. Pertumbuhan penduduk juga menambah tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan, mengurangi ketersediaan air bersih, energi, dan lahan pertanian yang berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, jika pertumbuhan ekonomi tidak merata dan hanya dinikmati oleh segelintir orang, kesenjangan ekonomi akan meningkat, menyebabkan sebagian besar penduduk tetap hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, tanpa perencanaan dan pengelolaan yang tepat, pertumbuhan penduduk yang cepat dapat memperburuk masalah kemiskinan di Kota Malang (Suhartono, dkk., 2014).

Jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun di berbagai daerah dipengaruhi oleh angka kelahiran. Pertumbuhan penduduk menjadi masalah ketika tidak terkelola, karena peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah dapat menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan. Selain pertumbuhan alami, urbanisasi juga berperan dalam pertumbuhan penduduk dan meningkatnya angka kemiskinan di Kota Malang. Sebagai salah satu kota terbesar di Jawa Timur, Malang mengalami urbanisasi yang signifikan, menarik banyak penduduk dari daerah sekitar maupun luar provinsi yang mencari peluang kerja, pendidikan, dan infrastruktur yang lebih baik. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri, dan keberadaan universitas-universitas ternama menjadikan Kota Malang sebagai pusat pendidikan di Indonesia, sehingga semakin banyak orang yang memilih untuk pindah ke kota ini. Hubungan antara urbanisasi dan kemiskinan cukup kompleks. Perpindahan penduduk dari daerah pedesaan atau kota lain ke Malang sering dianggap sebagai peluang untuk

meningkatkan kualitas hidup, karena kota ini menawarkan lebih banyak kesempatan kerja serta akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, urbanisasi juga dapat memperburuk kemiskinan. Tingginya tingkat pengangguran dan biaya hidup yang lebih tinggi di kota dapat menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di kalangan penduduk urban. Selain itu, urbanisasi yang tidak terencana dapat mengakibatkan terbentuknya permukiman kumuh dan memperburuk kesenjangan ekonomi. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang juga dapat memperparah kemiskinan di kota (Suhartono, dkk., 2014).

Perpindahan penduduk, urbanisasi, serta pertumbuhan penduduk asli yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan berdampak langsung pada tingkat kemiskinan di suatu kota. Ketika orang memilih untuk tinggal di kota besar seperti Malang, mereka biasanya mencari pekerjaan yang lebih baik dan peluang ekonomi yang lebih besar. Kota-kota besar seperti Malang memang menawarkan lebih banyak peluang kerja dan fasilitas serta infrastruktur dibandingkan daerah pedesaan. Namun, perpindahan penduduk yang tidak terkontrol bisa menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan munculnya permukiman kumuh, yang pada akhirnya meningkatkan kemiskinan perkotaan. Ketersediaan lapangan pekerjaan sangat penting karena bisa memberikan pendapatan yang stabil bagi penduduk yang pindah ke kota, sehingga membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, jika jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan pertumbuhan populasi atau tidak mampu menyerap tenaga kerja yang datang ke kota tersebut, maka pengangguran dan kemiskinan akan meningkat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dan infrastruktur menjadi faktor utama untuk mendukung pemberantasan kemiskinan di suatu daerah. Penurunan kemiskinan menjadi indikator utama keberhasilan ekonomi yang baik. Efektivitas pengentasan kemiskinan sangat penting dalam memilih strategi pembangunan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Nabawi, 2020).

Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pengurangan jumlah orang miskin. Penurunan tingkat kemiskinan secara efektif merupakan kunci dalam merumuskan strategi pembangunan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi hidup yang rendah, di mana sekelompok orang mengalami kekurangan materi dibandingkan dengan standar hidup umum masyarakat, termasuk dalam hal kesehatan, moral, dan aspek materi lainnya. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Isu kemiskinan tetap menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi, terutama di kota-kota besar seperti Kota Malang. Ekonomi Kota Malang didorong oleh sektor pariwisata, pendidikan, perdagangan jasa, dan berbagai jenis bisnis lainnya. Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan, seperti memberikan bantuan sosial, bantuan pangan non-tunai, normalisasi penduduk di bantaran sungai, serta pelatihan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah. Meskipun program pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya berhasil, jumlah penduduk miskin di Kota Malang terus menurun setiap tahunnya. Dari tahun 2011 hingga 2018, sebanyak 9.950 jiwa berhasil keluar dari kategori miskin, menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Malang. Rata-rata, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 1.421 orang setiap tahun, sehingga pada akhir 2018, tersisa 35.490 orang. Ini menunjukkan

bahwa Pemerintah Kota Malang telah mencapai hasil yang cukup baik dalam mengurangi kemiskinan, meskipun mereka masih belum berhasil mencapai target yang ditetapkan, yaitu 4,10 persen (Nabawi, 2020).

Faktor Pendidikan di Kota Malang

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Malang, jumlah penduduk di kota Malang ini meningkat rata-rata 5.375.286 jiwa per tahun dari 2011 hingga 2018, dengan total penduduk mencapai 866.118.000 jiwa pada tahun 2018. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus berlanjut, pemerintah Kota Malang perlu mengembangkan strategi yang konsisten untuk mengikuti perkembangan tahunan dan menetapkan target jangka menengah dalam mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan. Selain jumlah penduduk, tingkat pendidikan formal dan non-formal juga berpengaruh terhadap masalah kemiskinan. Pendidikan dapat secara tidak langsung meningkatkan produktivitas dan efisiensi kehidupan masyarakat. Secara langsung, kesejahteraan dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kreativitas, tercermin dalam pendapatan dan konsumsi Masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Malang. Jika jumlah penduduk berkurang, kemiskinan cenderung meningkat. Ini terjadi karena peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia, yang menyebabkan pengangguran dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, sehingga berujung pada kemiskinan. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan antara angka kelahiran dan kematian, struktur umur yang didominasi oleh usia dewasa dan muda, distribusi penduduk yang tidak merata antara kota dan desa, serta kualitas penduduk itu sendiri. Kota Malang juga menjadi daya tarik bagi banyak pengunjung, terutama karena kedekatannya dengan Kota Batu yang terkenal dengan objek wisata. Hal ini membuat banyak orang mencoba membuka usaha di Malang, namun beberapa di antaranya kesulitan bersaing dengan pendatang baru. Di sisi lain, ada pula yang menjadi pengemis akibat kemalasan, kondisi ekonomi yang sulit, dan kurangnya pengetahuan. Semua faktor ini berkontribusi pada peningkatan kemiskinan di Kota Malang meskipun populasi mengalami penurunan (BPS, 2020).

Akan tetapi, tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kemiskinan secara positif karena tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membuka usaha atau meningkatkan ekonominya, dan tingkat pendidikan tidak mempengaruhi produktivitas seseorang. Banyak pendatang juga belajar di Kota Malang, tetapi setelah lulus kembali ke kota asalnya. Sistem pendidikan memiliki masalah, seperti rendahnya tingkat kelulusan di berbagai tingkat pendidikan, yang menyebabkan laju pendidikan menjadi lambat, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan tenaga kerja dan menyebabkan kemiskinan (Sholikha, dkk., 2021).

Faktor Pembangunan Ekonomi di Kota Malang

Pengangguran terbuka merupakan indikator penting untuk mengukur kemiskinan dan pertumbuhan penduduk di Kota Malang. Terdapat hubungan erat antara pengangguran dan kemiskinan, di mana keduanya saling memengaruhi. Indikator

pengangguran dan setengah pengangguran dipilih karena keduanya memiliki korelasi. Individu yang belum bekerja dan aktif mencari pekerjaan tidak mendapatkan pendapatan, sementara setengah pengangguran merujuk pada mereka yang bekerja tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup karena jam kerja yang terbatas. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin besar kemungkinan peningkatan kemiskinan (Berliani, 2021). Tingkat Pengangguran Terbuka adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pengangguran dalam penelitian ini. Ini menunjukkan bahwa banyak individu yang memasuki usia kerja berakhir menjadi pengangguran. Penelitian oleh Ningrum (2017) menunjukkan adanya korelasi positif dan signifikan antara tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan beragam latar belakang, mereka harus bekerja lebih keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari (Damayanti, 2022).

Salah satu faktor yang memengaruhi kemiskinan di suatu daerah adalah pengangguran. Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang cukup dapat menyebabkan peningkatan pengangguran. Biasanya, ketika tingkat pengangguran naik, tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Teori yang telah dibahas menunjukkan bahwa produktivitas yang rendah berkontribusi pada penurunan pendapatan. Dengan kata lain, pengangguran berhubungan positif dengan kemiskinan; semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin besar kemiskinan yang dialami oleh Masyarakat. Namun, hubungan antara pengangguran dan kemiskinan dalam penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan teori tersebut. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia, pemerintah Kota Malang mengadakan penyuluhan dan bimbingan bagi pencari kerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan karyawan yang siap bekerja, memahami perjanjian kerja, memiliki keterampilan yang baik, dan sikap kerja yang positif. Selain itu, pekerjaan juga tersedia di sektor non-formal, yang kini banyak merekrut tenaga kerja dan didorong oleh kemajuan teknologi. Ini mendukung pertumbuhan industri ekonomi kreatif yang cepat. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran saat ini, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut (Damayanti, 2022).

Faktor pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan di suatu daerah. Ketika jumlah penduduk meningkat tanpa pengelolaan yang memadai, hal ini dapat menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran akibat kurangnya lapangan kerja. Sebagai hasilnya, angka kemiskinan juga akan meningkat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Damayanti, 2022).

Upaya Menanggulangi Permasalahan Kemiskinan di Kota Malang

Potret kemiskinan di Kota Malang bisa dikatakan terus mengalami perbaikan. Menurut data BPS Jawa Timur tahun 2014, Kota Malang menduduki peringkat kedua dengan tingkat kemiskinan terendah setelah Kota Batu. Hal ini disebabkan oleh upaya pemerintah yang aktif dalam mengatasi kemiskinan di Kota Malang. Peran birokrasi pemerintahan hingga ke tingkat kelurahan sangat penting dalam merangsang "Development creativity and motivating" di masyarakat. Untuk melawan kemiskinan,

Pemerintah Kota Malang melakukan berbagai upaya serius. Salah satunya dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. TKPK diketuai oleh Walikota Malang dan melibatkan berbagai OPD terkait seperti dinas pendidikan, dinas sosial, dan dinas kesehatan. Pada tahun 2016, TKPK memiliki tiga program utama yaitu:

1. Program bantuan sosial terpadu berbasis individu dan keluarga dengan anggaran Rp 175,6 miliar, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi beban hidup, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan anggaran Rp 152,8 miliar, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat.
3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil dengan anggaran Rp 8,8 miliar, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha kecil.

Implementasi kebijakan ini berdasarkan Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 28 tahun 2014. Analisis kebijakan ini menurut Merilee S. Grindle mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan. Kebutuhan masyarakat seperti bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta subsidi murah.
2. Jenis manfaat yang dihasilkan. Kemudahan akses untuk hidup lebih layak bagi penyandang masalah kesejahteraan, termasuk bantuan material dan non-material.
3. Derajat perubahan yang diinginkan. Mengurangi jumlah warga miskin dan menghapus stigma serta diskriminasi terhadap mereka, serta meningkatkan kualitas hidup.
4. Kedudukan pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan adalah kelompok masyarakat yang dibantu oleh DPRD Kota Malang. DPRD hanya mengesahkan kebijakan yang dibuat.
5. Pelaksana program. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang melibatkan OPD terkait dan masyarakat.
6. Sumber daya yang dikerahkan. Sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung program-program tersebut.

Konteks implementasi kebijakan ini meliputi:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat: Semua OPD terkait memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan, bukan hanya Dinas Sosial. Strategi yang digunakan adalah edukasi dan informasi untuk mengurangi stigma dan diskriminasi serta mendorong warga miskin untuk mandiri.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa: Pemerintah dan instansi mulai lebih memperhatikan penyandang masalah kesejahteraan, membantu warga berekonomi rendah untuk mendaftar ke dinas sosial agar mendapatkan bantuan.

3. Kepatuhan dan daya tanggap: Meskipun bantuan dan pelatihan sudah diberikan, respons masyarakat miskin masih kurang. Banyak yang masih mengandalkan bantuan pemerintah daripada berusaha mandiri (Larasati, 2013).

Kesimpulan dan Saran

Kajian pustaka dan analisis data di atas menyimpulkan bahwasannya Kemiskinan di Kota Malang merupakan sebuah isu kompleks yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama: pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang pesat tanpa diimbangi dengan lapangan pekerjaan dan infrastruktur yang memadai dapat memperparah kemiskinan. Hal ini dapat diatasi dengan perencanaan dan pengelolaan penduduk yang tepat, pengembangan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur dan layanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, serta penegakan hukum yang adil. Tingkat pendidikan yang rendah juga berkontribusi terhadap kemiskinan. Solusi untuk mengatasi hal ini adalah meningkatkan akses dan mutu pendidikan, mendorong program pendidikan non-formal dan pelatihan vokasi, serta memberikan beasiswa dan bantuan keuangan untuk pendidikan. Faktor ketiga adalah pembangunan ekonomi yang tidak merata dan kurangnya lapangan kerja berkualitas. Hal ini dapat diatasi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan penciptaan lapangan kerja, memberikan kemudahan akses terhadap modal dan teknologi bagi UKM, membangun infrastruktur dan regulasi yang kondusif, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penting untuk diingat bahwa ketiga faktor ini saling terkait dan solusi untuk mengatasinya harus komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2021). Persentase Penduduk Miskin Di Kota Malang, Jawa Timur, dan Indonesia (Persen) 2011 - 2020. Diakses 24 Agustus 2021. <https://malangkota.bps.go.id/indicator/23/428/1/persentase-penduduk-miskin-di-kota-malang-jawa-timur-dan-indonesia.html>
- Berliani, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Pendidikan Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6 (2), 872-82.
- Damayanti, A. (2022). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Malang. *Independent: Journal of Economics*, 2 (1), 1-15.
- Ferezegia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1 (1), 1-6.
- Larasati, N. 2013. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang. *Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga*.

- Nabawi, H. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan PRDB Terhadap Kemiskinan di Kota Malang. *OECONOMICUS Journal Of Economics*, 4 (2).
- Nasution, A. S., & Tambunan, K. (2022). Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3 (1), 11-25.
- Ningrum, S. S. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15 (2), 184.
- Nurainun, Siregar, S. B., Harahap, P. P., Sinaga, E. P., Siregar, T. M. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif*, 7 (12).
- Setyoharini, E. F. (2022, 2 Desember). Tingkat Kemiskinan Kota Malang 4,37 Persen, Terendah Kedua di Jatim. Diakses pada 8 Juni 2024 dari <https://malangkota.go.id/2022/12/02/tingkat-kemiskinan-kota-malang-437-persen-terendah-kedua-di-jatim/>
- Sholikah, M., Imaningsih, N., Wijaya, R. S. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Tuban. *Jurnal Syntax Admiration*. 2 (7), 5– 24.
- Suhartono, D., Kanto, S., Mu'adi, S. (2014). Kajian Tentang Makna, Penyebab, dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Kajian Fenomenologi Komunitas Pemulung di TPA Supit Urang Kota Malang). *Wacana*, 17 (4).